



Save the Children

BERPIHAK PADA ANAK

Laporan Tahunan 2019
Indonesia



Save the Children

Keyakinan Kami

Setiap anak berhak mendapatkan masa depan.
Kehidupan, suara, dan potensi mereka
harus dilindungi dengan segala daya.





Staf Save the Children memantau pemuatan bantuan non-makanan dari pesawat ke truk untuk didistribusikan kepada penyintas gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, Indonesia, pada Oktober 2018. Sulitnya akses membuat Save the Children harus mengirim bantuan non-makanan melalui berbagai jalur yang memungkinkan, baik darat, laut, maupun udara. (Thomas Gustafian/Save the Children)



Daftar Isi

06	Kisah Kami	28	Respons Kemanusiaan
08	Program dan Penerima Manfaat Kami pada 2019	32	Tata Kelola Hak Anak
10	Area Program Kami pada 2019	36	Aktivitas Advokasi dan Kampanye Kami
12	Kesehatan dan Gizi	38	Aktivitas Penggalangan Dana Kami
16	Perlindungan Anak	40	Tentang Organisasi Kami
20	Pendidikan	41	Profil Keuangan Kami
24	Kemiskinan Anak	42	Struktur Organisasi

Kisah Kami

Kisah kami dimulai pada tahun 1919 saat Eglantyne Jebb mendirikan Save the Children Fund di London saat Perang Dunia I berkecamuk. Gerakan ini segera menjadi gerakan global pertama untuk anak-anak.

Sebagai seorang kampiun yang lantang berbicara untuk anak-anak, Jebb menyusun Deklarasi Hak-Hak Anak yang bersejarah, yang diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1924. Draf tersebut kemudian diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 sebagai Konvensi Hak-Hak Anak. Konvensi ini menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling diterima secara universal dalam sejarah.

Di Indonesia, Save the Children telah beroperasi sejak tahun 1976. Pada tahun 2004, kami termasuk yang pertama turun untuk respons kemanusiaan Tsunami Asia yang berpusat di Aceh. Respons lima tahun tersebut menjadi salah satu respons kemanusiaan terbesar dalam sejarah Save the Children.

Pada tahun 2014, Yayasan Sayangi Tunas Cilik muncul sebagai entitas lokal dari Save the Children di Indonesia. Save the Children di Indonesia adalah bagian dari gerakan global Save the Children yang beroperasi di lebih dari 120 negara di enam benua.

Komitmen Kami

Kami akan mengerahkan segala daya untuk menyelamatkan anak-anak

Ambisi Kami untuk Anak-Anak pada 2030

Bertahan Hidup

Tidak boleh ada anak yang meninggal karena sebab yang bisa dicegah sebelum ulang tahun kelima mereka.

Belajar

Semua anak bisa mendapat pendidikan dasar yang berkualitas.

Terlindungi

Kekerasan terhadap anak tidak lagi mendapat toleransi.

Visi Kami

Visi kami adalah membangun dunia di mana setiap anak memiliki hak hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi.

Misi Kami

Misi kami adalah menginspirasi munculnya terobosan tentang bagaimana seharusnya dunia memperlakukan anak sehingga tercipta perubahan yang cepat dan bertahan lama dalam hidup mereka.

Nilai Kami

Akuntabilitas

Kami menggunakan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab, mencapai hasil yang bisa diukur, dan terbuka pada para pendukung, mitra, dan anak-anak.

Ambisi

Kami menetapkan standar yang tinggi dan berkualitas pada semua hal yang kami lakukan untuk anak-anak.

Kolaborasi

Kami saling menghormati dan menghargai satu sama lain, hidup dalam keberagaman, serta saling bermitra untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan anak-anak.

Kreativitas

Kami terbuka terhadap ide-ide baru, adaptif terhadap perubahan, dan berani mengambil risiko yang terukur untuk mengembangkan solusi berkelanjutan bagi dan bersama anak-anak.

Integritas

Kami bercita-cita hidup dengan standar kejujuran dan perilaku yang tinggi, tidak mengkompromikan reputasi kami, dan selalu bertindak atas dasar kepentingan terbaik bagi anak-anak.



Pneumonia adalah pembunuh balita tertinggi kedua di dunia. Di Indonesia, Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu daerah dengan tingkat pneumonia anak tertinggi (Risksdas 2018). Bekerja sama dengan kader Posyandu dan pemerintah, Save the Children memberikan konseling dan bimbingan kepada orangtua di Sumba Barat mengenai pneumonia dan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan sehingga anak-anak dapat dijauhkan dari penyakit ini. (Ulet Ifansasti/Save the Children)

Teori Perubahan Kami

Teori Perubahan adalah pendekatan kami untuk menciptakan terobosan yang inspiratif bagi anak-anak. Teori ini menjelaskan bagaimana kami bekerja guna menciptakan hasil yang cepat dan tahan lama bagi anak-anak.

Program-program kami menggunakan pendekatan empat pilar Teori Perubahan, sehingga tercipta kemajuan yang berkelanjutan dan mendorong perubahan yang diperlukan bagi kehidupan anak-anak.



Program dan Penerima Manfaat Kami pada 2019

Pada tahun 2019, Save the Children di Indonesia menerapkan enam tematik program.



Kesehatan dan Gizi

Di Indonesia, satu bayi meninggal setiap tujuh menit karena penyebab yang dapat dicegah dan diobati. Itulah sebabnya kami berkomitmen menyediakan program kesehatan dan gizi yang kuat untuk meningkatkan kesehatan dan gizi bagi ibu, bayi baru lahir, dan anak-anak, dengan perhatian khusus kepada masyarakat yang miskin dan rentan. Program ini juga mencakup kualitas pengasuhan mereka; meningkatkan penyerapan gizi bagi bayi yang baru lahir dan anak-anak; meningkatkan sistem rujukan untuk ibu dan bayi baru lahir dalam keadaan darurat; dan mengintegrasikan pendekatan kami di tingkat lokal dan nasional.



Perlindungan Anak

Kami berkomitmen melindungi anak-anak dari pelecehan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan. Program kami berfokus pada anak-anak yang paling rentan sembari tetap memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan semua anak. Bekerja sama dengan pemerintah, organisasi internasional, dan mitra setempat, kami berusaha menciptakan perubahan yang bertahan lama dengan meningkatkan kebijakan dan layanan yang melindungi anak-anak baik dalam konteks bencana alam atau pembangunan. Kami memastikan pengasuhan yang tepat untuk anak-anak dengan tiga komponen utama; pencegahan, respons kasus, dan reformasi hukum di tingkat lokal dan nasional.



Pendidikan

Pendidikan adalah jalan yang ditempuh anak-anak untuk mencapai potensi penuh mereka. Namun banyak anak yang membutuhkan justru tidak bisa mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga perkembangan mereka terhambat. Program kami berfokus pada peningkatan akses untuk anak-anak yang kurang mampu, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, dan pada peningkatan kualitas pendidikan inklusif. Kami juga mendukung program pendidikan untuk anak-anak di sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak untuk belajar.

Penerima Manfaat Langsung pada 2019*

215.213 Anak

150.899 Dewasa



* Jumlah total penerima manfaat langsung bukanlah akumulasi dari total penerima manfaat langsung dari setiap tematik program. Hal ini disebabkan karena sebagian penerima manfaat langsung terlibat dalam beberapa tematik program. Jadi untuk mendapatkan angka yang sebenarnya, kami mengkurasi data yang ada untuk menghindari penghitungan ganda.



Kemiskinan Anak

Anak-anak cenderung akan lebih sehat dan mendapat pendidikan yang berkualitas jika keluarganya aman secara finansial. Untuk membantu orangtua memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka, program kemiskinan anak kami berfokus pada peningkatan keterampilan dan praktik keuangan bagi keluarga yang membutuhkan. Kami juga membantu anak-anak muda untuk menghadapi dunia kerja dengan mengajari mereka cara membangun keterampilan, jaringan, dan kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk melakukan transisi ke kualitas penghidupan yang lebih baik.



Respons Kemanusiaan

Tidak ada yang tahu kapan gempa bumi, banjir, atau tsunami berikutnya akan melanda. Tapi kita tahu anak-anak akan sangat terdampak oleh bencana alam tersebut. Itu sebabnya kami selalu siap membantu anak-anak baik selama maupun setelah bencana melanda melalui layanan perlindungan anak, pendidikan, dan kesehatan dalam situasi darurat. Selain memberikan respons kemanusiaan dalam setiap bencana, kami juga memelopori program Pengurangan Risiko Bencana yang terpusat pada anak untuk membantu mereka mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu terjadi bencana.



Tata Kelola Hak Anak

Dalam Tata Kelola Hak Anak, kami fokus memastikan pemenuhan hak-hak anak melalui kebijakan dan komitmen dari semua sektor termasuk pemerintah dan masyarakat. Kami juga fokus pada peningkatan akuntabilitas pemenuhan hak-hak anak di sektor industri dan korporasi.

Penerima Manfaat Tak Langsung pada 2019*

69.796 Anak

10.438.713 Dewasa



* Jumlah total penerima manfaat tak langsung bukanlah akumulasi dari total penerima manfaat tak langsung dari setiap tematik program. Hal ini disebabkan karena sebagian penerima manfaat tak langsung terlibat dalam beberapa tematik program. Jadi untuk mendapatkan angka yang sebenarnya, kami mengkurasi data yang ada untuk menghindari penghitungan ganda.

Area Program Kami pada 2019

Pada 2019, kami mengimplementasikan lebih dari 20 program di 10 provinsi. Program kami mencakup 70 kota/kabupaten, 404 kecamatan, dan 1.136 desa di Indonesia.

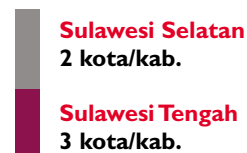
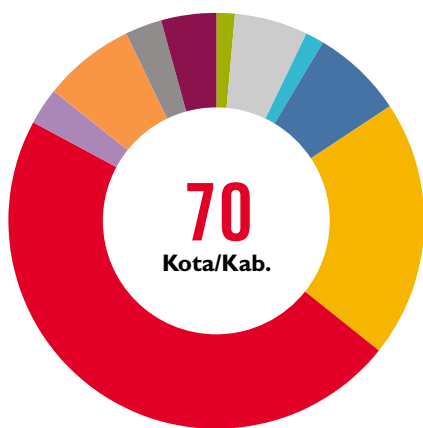
Program kami dilaksanakan melalui kemitraan erat dengan pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional, melalui berbagai kementerian dan juga lembaga pemerintah. Kemitraan ini telah

dikembangkan dan akan terus dilanjutkan untuk memastikan bahwa anak-anak di Indonesia mendapatkan hak-hak mereka.

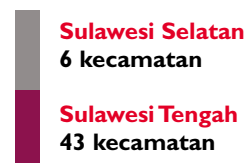
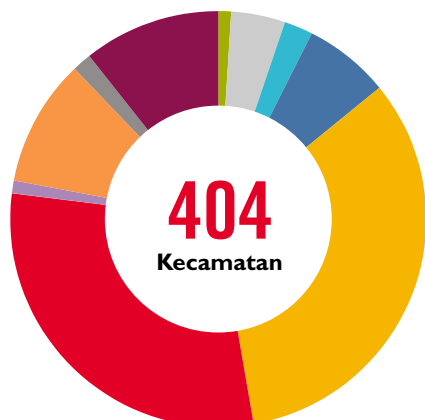
Kami juga bekerja dan berkolaborasi secara erat dengan berbagai organisasi nirlaba, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, serta banyak organisasi dan lembaga lainnya.



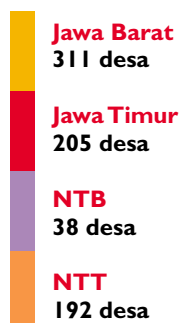
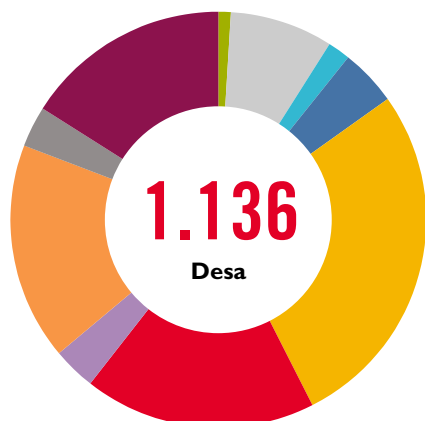
Area Program Kami di Tingkat Kota/Kabupaten pada 2019



Area Program Kami di Tingkat Kecamatan pada 2019



Area Program Kami di Tingkat Desa pada 2019



Area Program Berdasarkan Tematik



Kesehatan dan Gizi

DKI Jakarta, Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tengah



Perlindungan Anak

Sumatra Barat, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah



Pendidikan

DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan



Kemiskinan Anak

Sumatra Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan



Respons Kemanusiaan

Lampung, Banten, Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan



Tata Kelola Hak Anak

DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan

KESEHATAN DAN GIZI

Kisah Erna

Pneumonia adalah pembunuh balita tertinggi kedua di dunia. Di Indonesia, Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu daerah dengan tingkat pneumonia pada anak tertinggi (Risksedas 2018).

Bekerja sama dengan kader Posyandu dan pemerintah, Save the Children mengkampanyekan apa itu pneumonia dan bagaimana pencegahannya pada para orangtua di Sumba Barat.

“Saya tidak tahu jika asap dari tungku api di dapur itu berbahaya bagi kesehatan anak saya. Kampanye ini telah meningkatkan pengetahuan saya tentang bahaya pneumonia,” ungkap Erna (25), salah satu orangtua.

Selain melakukan kampanye untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku orangtua, kami juga memberikan konseling dan bimbingan kepada orangtua agar anak-anak mereka dapat terhindar dari pneumonia. Kami juga mengadvokasi masalah ini ke pemerintah agar tercipta kebijakan yang bisa mencegah anak terpapar pneumonia.

73.044

Anak-anak dijangkau langsung

58.897

Orang dewasa dijangkau langsung

DATA KEGIATAN TAHUN...

POKJA II

NO	LINGKUP	PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN										KADER KHUSUS			KADER UMUM		PRA KOP/UM		
		WAKTU MARI MARI ARIKA	PKET A	PKET B	KEJAR USAHA	JML TAMBAH KEAARU/PEKUSTA PAKET	JML KE LUM PER	JML IBU PESER TA	JML APE (SET)	JML KEL SING LASI BKB	TUTOR KEJAK PAKET A	B K B	KO PE RA SI	KETRAM PILAN	JML KADER YANG DILATIH	LPS PPK	TPK 5 PPK	UPZK PPK	JML PE SER TA
1	LINDA I																		
2	LINDA II																		
3	LINDA III																		

POKJA III

NO	LINGKUP	PANGAH			KERAJINAN PANGAH	KERAJINAN TANGGA
		JML KADER PANGAH	JML PEMANTAUAN PERAKHON (MINTYA PPK)	JML TANAMAN ORAT KELUARGA		
1	LINDA I					
2	LINDA II					
3	LINDA III					

POKJA IV

NO	LINGKUP	KESEHATAN				KESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			
		JML KADER KESEHATAN	JML KADER KESEHATAN	JML KADER KESEHATAN	JML KADER KESEHATAN	JML KADER KESEHATAN	JML KADER KESEHATAN	JML KADER KESEHATAN	JML KADER KESEHATAN
1	LINDA I								
2	LINDA II								
3	LINDA III								



Tinjauan Dasar

Angka kematian balita adalah 32 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa 1 dari 31 anak meninggal sebelum mencapai usia lima tahun (IDHS, 2017). Tiga perempat (75%) kematian dalam lima tahun pertama kehidupan terjadi antara kelahiran dan ulang tahun pertama. 63% kematian bayi terjadi dalam bulan pertama kehidupan (IDHS, 2017). 62,8% kematian balita terjadi di rumah sakit, 24,4% di rumah, sedangkan sisanya di fasilitas kesehatan lain atau selama masa rujukan (SRS, 2014).

Pneumonia adalah pembunuh utama balita di Indonesia.

16% kematian anak pada tahun 2018 disebabkan oleh pneumonia. Indonesia masih menghadapi banyak tantangan untuk mengatasi pneumonia. Pada tahun 2018, pneumonia membunuh lebih dari 19.000 balita, yang setara dengan lebih dari kematian dua anak per jamnya. Penyebaran pneumonia nasional adalah 18,5%, tetapi di beberapa provinsi seperti NTT, angkanya bisa mencapai 38,5%.

Tingkat penemuan kasus pneumonia hanya 51%, yang berarti hanya setengah dari anak-anak dengan tanda dan gejala pneumonia yang dapat diidentifikasi dengan tepat. Selain itu, perawatan antibiotik yang benar hanya tersedia untuk 39% dari seluruh kasus.

Vaksin PCV telah diperkenalkan di beberapa daerah mulai 2018, tetapi untuk menjangkau seluruh anak dengan vaksin ini merupakan tantangan tersendiri. Secara keseluruhan, hanya 57,9% anak di bawah dua tahun yang diimunisasi lengkap, sehingga sekitar 40% dari mereka tidak sepenuhnya terlindungi dari penyakit ini.

Kesenjangan utama ada dalam aksesibilitas layanan kesehatan dasar, dengan tingkat ketersediaan yang jauh

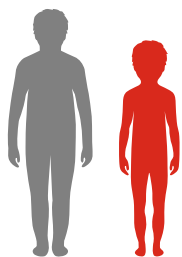
lebih rendah di bagian timur Indonesia. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) telah banyak digunakan di Indonesia sebagai standar perawatan bagi petugas kesehatan dalam mengidentifikasi dan merawat balita yang terkena diare dan pneumonia. Akan tetapi, hanya 58,2% petugas kesehatan yang memenuhi standar MTBS ini. Pada tingkat layanan dasar, ketersediaan fasilitas dengan petugas kesehatan yang terlatih MTBS masih cukup rendah, yaitu 42,6%.

Hampir 1 dari tiap 2 kasus kematian balita disebabkan oleh kekurangan gizi. Tingkat stunting yang berada di angka 30,8% menunjukkan jika 1 dari 3 anak balita terkena stunting (Riskesdas, 2018). Dari perspektif siklus hidup, stunting terjadi akibat buruknya asupan gizi selama masa pra-kehamilan. Wanita mengalami anemia dan kekurangan berat badan bahkan sebelum mereka hamil, dan masalah yang tidak diatasi ini berkontribusi pada perkembangan bayi dalam kandungan yang kurang optimal dan bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah (Riskesdas, 2018).

Semua data yang disebutkan di atas menunjukkan jika sebagian besar anak-anak mengalami kematian karena sebab yang dapat dicegah. Minimnya layanan kesehatan yang tersedia karena disparitas geografis, ditambah dengan kualitas perawatan dan sistem rujukan yang belum maksimal masih menjadi tantangan tersendiri.

Terobosan pada kasus kematian balita di Indonesia bergantung pada pengurangan substansial kematian bayi baru lahir; serta penanganan pneumonia anak sebagai pembunuh utama. Bersamaan dengan ini, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengatasi kekurangan gizi sebagai kondisi yang melatarbelakangi situasi tersebut.

1 DARI 31 anak-anak meninggal sebelum mencapai ulang tahun kelima mereka. (SDKI, 2017)



1 DARI 3 balita di Indonesia mengalami stunting. (Riskesdas, 2018)

Hampir **1 DARI 2** kasus kematian balita disebabkan oleh kurang gizi.

1 DARI 4 anak di Indonesia tidak memenuhi standar minimum variasi makanan. (SDKI, 2017)



Hanya **37.3%** anak-anak yang mendapatkan ASI eksklusif. (Riskesdas, 2018)



Hanya **57,9%** anak-anak yang mendapatkan imunisasi lengkap. (SDKI, 2017)

Tujuan Strategis Kami

Setiap balita, baik laki-laki maupun perempuan, dari keluarga dan komunitas yang paling rentan di kabupaten sasaran bisa menikmati layanan kesehatan, gizi, dan praktik pengasuhan yang baik dari orangtua/pengasuh.

Sasaran Strategis Kami

1. Mengurangi kematian balita akibat pneumonia dan mengurangi tingkat stunting pada balita.
2. Berkontribusi pada perubahan yang cepat dan bertahan lama dalam kehidupan anak-anak dan keluarganya yang terkena bencana melalui bantuan kemanusiaan, akses berkelanjutan ke layanan dasar, dan partisipasi aktif dalam pemulihan diri mereka sendiri.

Program Intervensi dan Pencapaian pada 2019

1. Strategi kampanye pneumonia dikembangkan pada tahun 2018. Save the Children dengan Kementerian Kesehatan kemudian menyelesaikan materi kampanye, beberapa di antaranya telah diuji ke publik, dan pada awal 2019, kami telah meluncurkan kampanye pneumonia dengan skala nasional. Sejak itu, kami telah mengimplementasikan banyak acara di tingkat nasional dengan implementasi prioritas di wilayah sasaran utama (Bandung, Jawa Barat dan Sumba Barat, NTT).
2. Di Sumba, gugus tugas Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBSM) tingkat lokal dibentuk untuk mendukung prosedur standar Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pada 2018-2019, kami mengujicobakan penggunaan teknologi m-Health inovatif yang disebut Medsync, diagnosis MTBS di 10 Puskesmas di Sumba Barat. DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) sepakat untuk mengalokasikan Rp 26.000.000 untuk setiap desa pada tahun anggaran 2020 di bawah Dana Desa. Dana ini diperuntukkan untuk kesehatan, terutama untuk mengatasi pneumonia dan stunting pada anak.
3. Di Bandung, penandatanganan Surat Keputusan (SK) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) MTBS oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (SK No. 34106/440/XII/Dinkes/2019 pada 27 Desember 2019) telah dilakukan.
4. Di tingkat nasional, Save the Children, Unicef, dan Nutrition International (NI) telah mendukung finalisasi Rencana Aksi Nasional untuk Pneumonia dan Diare, yang 90%-nya telah selesai pada awal 2019. Kami mengamati adanya proses penandatanganan yang lambat dari Kemenkes karena kebutuhan untuk memperbarui beberapa data yang berasal dari direktorat dan kementerian yang berbeda. Meskipun demikian, Save the Children, Unicef, dan NI telah mulai menyebarluaskan konten Rencana Aksi Nasional tersebut secara informal ke daerah.
5. Untuk mendukung Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting, Save the Children memprakarsai program pencegahan stunting di Jawa Barat, NTT, dan Sulawesi Tengah, mengikuti Pendekatan *Nourishing the Youngest Common* (fokus pada bayi dalam kandungan, baduta, dan remaja).
6. Dalam konteks respons kemanusiaan, pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dalam Situasi Darurat sedang diselesaikan (dijadwalkan pada tahun 2020) untuk melawan garis depan dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kementerian Sosial. Sedangkan paket pelatihan Nutrition in Emergency (NIE) secara keseluruhan telah diselesaikan pada tahun 2019 bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Unicef. Pelatihan ini telah diadopsi dan digunakan baik oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah lainnya dalam konteks kesiapsiagaan bencana dan respons kemanusiaan.
7. Membantu kabupaten-kabupaten yang terkena dampak bencana dengan meluncurkan panduan operasional Pemberian Makan Bayi dan Anak dalam Situasi Darurat yang baru bersama dengan Unicef dan Kementerian Kesehatan, di mana Save the Children berkontribusi dalam pengembangan modul pelatihan dan buku pedoman. Save the Children juga meluncurkan program baru pencegahan stunting selama lima tahun senilai US\$ 10 juta dengan Nutrition International (NI).
8. Melatih staf Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten, dan Puskesmas dengan Demonstrasi Emosional, sebuah sesi interaktif dengan permainan yang menyentuh emosi ibu dan pengasuh balita untuk meningkatkan kualitas Pemberian Makan Bayi dan Anak diikuti dengan pengawasan suportif. Hasilnya, Kabupaten Sigi mengalokasikan sekitar US\$ 4.000 untuk melanjutkan pelatihan tersebut ke 19 Puskesmas pada tahun 2020 sebagai inovasi untuk mencegah stunting. Save the Children juga membagikan kupon makanan segar untuk wanita hamil dan anak-anak di bawah dua tahun.
9. Kami juga mencatat bukti adanya peningkatan pengetahuan dan praktik mencuci tangan oleh anak-anak di Sumba, sembari memastikan penyaringan kesehatan yang efektif di sekolah. Proporsi anak-anak yang melaporkan praktik mencuci tangan di masa kritis meningkat dari 41,1% di awal program menjadi 76,3% pada jangka menengah, serta anak-anak yang dilaporkan menggunakan toilet sekolah meningkat dari 81,2% menjadi 84%. Peningkatan ini disebabkan oleh ketersediaan fasilitas WASH di sekolah, dari 57,5% menjadi 89,7%, dan didukung oleh pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah. Kami meluncurkan Waliku sebagai aplikasi teknologi untuk memantau ketidakhadiran siswa di Sumba, yang salah satu kesimpulannya adalah bahwa kondisi kesehatan (batuk dan sakit kepala) adalah penyebab utama dari ketidakhadiran anak-anak. Penggunaan Waliku di masa depan bertujuan menjangkau sekolah sebagai penyedia layanan kesehatan dan kesejahteraan setempat untuk merawat siswa yang sangat membutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan siswa. Pencatatan data tentang ketidakhadiran akan berkontribusi pada pemetaan ketidakhadiran, menyediakan lebih banyak informasi untuk penyedia layanan kesehatan dan perlindungan, baik sekolah maupun orangtua, untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

Kemitraan

Save the Children bekerja dalam kemitraan dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden, DPMD, PKK, Bappeda, Bappenas, BNPB, BPBD, NI, Unicef, AIMI, SELASI, UI, WVI, dan IKMI. Kami telah terlibat dengan berbagai organisasi non-pemerintah di bawah dua koalisi/aliansi utama: Koalisi Nasional GKIA, dan Koalisi Scaling Up Nutrition-SUN untuk intervensi stunting.



PERLINDUNGAN ANAK

Kisah Raras

Keluarga seharusnya menjadi lingkungan paling aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Tetapi sebagian besar kekerasan terhadap anak justru terjadi di lingkungan keluarga. Raras* (sekarang berusia 22 tahun), adalah seorang gadis yang mengalami kekerasan seksual. Hidupnya berubah drastis setelah sepupunya memperkosanya beberapa tahun yang lalu. Akibatnya, ia mengandung dan melahirkan seorang bayi perempuan.

“Raras terlahir dengan gangguan wicara dan pendengaran. Dia hanya bersekolah sampai taman kanak-kanak karena keterbatasan keuangan kami. Hampir setiap hari dia tinggal sendirian di rumah karena kami harus bekerja. Peristiwa itu terjadi ketika kami tidak ada di rumah. Setelah itu, ia sering terlihat takut dan tertekan,” kata Sukarsi* (41), ibunya.

Raras saat ini sedang menjalani masa pemulihan. Kami memberikan bantuan psikologis dan membantunya menyediakan kebutuhan dasar untuk anaknya.

Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak layaknya puncak gunung es sebab kasus seperti ini jarang dilaporkan karena banyak dari pelakunya masih merupakan keluarga sendiri.

* Bukan nama sebenarnya.

24.712

Anak-anak dijangkau langsung

9.596

Orang dewasa dijangkau langsung

Tinjauan Dasar

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah dalam rangka melindungi anak-anak dari tindak kekerasan. UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC - United Nations Convention on the Rights of the Child). Konvensi ini diperlukan oleh negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, baik dalam hal pencegahan maupun penanganan, termasuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi para korban kekerasan.

Untuk mendukung pemerintah dalam mengimplementasikan UNCRC, Save the Children berkolaborasi dengan pemerintah dan bekerja dengan anak-anak serta masyarakat untuk memperkuat

sistem perlindungan anak dan juga untuk mengubah sikap dan norma sosial yang tidak berpihak pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan jika 1 dari 4 anak laki-laki dan 1 dari 8 anak perempuan telah mengalami kekerasan dalam rentang 12 bulan terakhir (KemenPPPA 2018).

Anak-anak yang mengalami kekerasan umumnya berisiko lebih tinggi untuk putus sekolah. 7% anak usia 10-17 tahun (sekitar 2,5 juta) dipaksa untuk bekerja dan 30% dari 35 juta anak usia 10-17 harus bekerja (sekitar 10 juta). Hal ini berpotensi membuat anak-anak putus sekolah (Sakernas, 2018).

1 DARI 2 anak laki-laki pernah mengalami kekerasan emosional. (KemenPPPA, 2018)



1 DARI 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. (KemenPPPA, 2018)

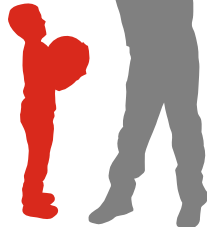


84% anak usia 12-17 tahun pernah mengalami perundungan dan sebagian besar di antaranya mengalaminya secara daring. (Kemensos)



2,5 JUTA anak usia 10-17 tahun dipaksa untuk bekerja. (Sakernas, 2018)

1 DARI 2 anak laki-laki pernah mendapat kekerasan fisik. (KemenPPPA, 2018)



1 DARI 9 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. (Susenas, 2018)



Tujuan Strategis Kami

Anak-anak bisa dilindungi dengan lebih baik melalui penerapan SDG 16.2 dalam mengurangi siksaan, penelantaran, dan eksploitasi di semua lingkungan (rumah, sekolah, lembaga, dan masyarakat) serta dalam konteks respons kemanusiaan maupun pembangunan.

Sasaran Strategis Kami

1. Pengetahuan, sikap, dan praktik yang meningkat untuk anak-anak, keluarga, komunitas, dan masyarakat dalam pengasuhan yang tepat dari dalam keluarga inti mereka sendiri, atau bila perlu, dalam keluarga besar dan dalam hubungan alternatif lain berbasis komunitas agar anak-anak yang menghadapi masalah menerima dukungan yang efektif dan tepat, melalui layanan langsung atau lewat lembaga pemerintah dan masyarakat sipil lainnya.
2. Anak-anak dicegah untuk memasuki bentuk-bentuk pekerjaan yang eksploitatif dan berbahaya, yang tidak selaras dengan hukum, kebijakan, maupun peraturan nasional dan internasional.
3. Memperkuat sistem peradilan anak untuk menciptakan sistem peradilan yang ramah anak melalui promosi diversifikasi dan keadilan restoratif, juga meningkatkan tenaga kerja sosial dengan mendukung pemerintah dalam membangun kapasitas pekerja sosial untuk mempraktikkan manajemen kasus yang terintegrasi dengan program perlindungan sosial yang tersedia.
4. Memastikan perlindungan dan kesejahteraan psikososial serta dukungan bagi anak dan keluarga, termasuk Unaccompanied and Separated Children (UASC) dalam konteks respons kemanusiaan. Melindungi anak dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi, serta menyediakan dukungan pada para penyintas kekerasan agar bisa mengakses layanan secara aman, responsif, dan holistik.

Program Intervensi dan Pencapaian pada 2019

1. Kami fokus pada pendekatan berbasis sistem untuk memperkuat upaya tematik perlindungan anak. Salah satu komponen sistem adalah kebijakan dan perundang-undangan di mana reformasi dan penegakan hukum akan memberikan pengaruh besar bagi perubahan metode dan alokasi sumber daya agar mempunyai jangkauan yang lebih besar. Bekerja melalui jaringan dan aliansi juga akan memperkuat pekerjaan dan mendapatkan hasil yang lebih besar, dengan berbagi praktik-praktik baik untuk direplika di wilayah kerja lembaga lain, atau advokasi bersama agar memiliki dampak yang lebih besar. Penguatan mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat di tingkat desa menjadi lebih strategis dan efektif untuk menciptakan rasa kepemilikan dan partisipasi masyarakat agar mau menyebarkan pesan-pesan utama dan meningkatkan upaya pencegahan dan memberikan tanggapan, juga menggunakan internet dan teknologi dalam rangka menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas, melalui pengembangan kursus elektronik dan alat untuk kampanye melalui media sosial dan daring.
2. Dua produk hukum nasional pada tahun 2019, yaitu Amandemen Undang-Undang Perkawinan untuk meningkatkan usia anak perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, sama dengan usia anak laki-laki untuk menikah secara resmi, dan adopsi Undang-Undang Pekerja Sosial yang meningkatkan status hukum pekerja sosial, wajibnya sertifikasi kompetensi dan lisensi yang mempengaruhi pekerja sosial yang bekerja dalam perlindungan anak. Pedoman Teknis Pengasuhan Anak telah disusun oleh Kementerian Sosial dan sedang diuji coba di empat provinsi sebagai bagian dari usaha mendorong pengasuhan alternatif berbasis keluarga. Kami terlibat dalam beberapa kegiatan mendukung advokasi dan kampanye untuk kedua undang-undang tersebut. Pekerjaan advokasi kami telah mempengaruhi pengembangan peraturan pemerintah di tingkat nasional dan daerah, termasuk rancangan prosedur standar operasi tentang pencegahan dan tanggapan terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah.
3. Kami terus memainkan peran penting dalam aliansi organisasi non-pemerintah untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Anak-Anak (Aliansi EVAC) dan berkontribusi mendukung peluncuran INSPIRE, 7 strategi global untuk EVAC (End Violence Against Children), dan pengembangan strategi reformasi hukum nasional untuk mengakhiri hukuman fisik. Save the Children memfasilitasi pembentukan Aliansi EVAC di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 27 anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal. Dengan Aliansi EVAC, Save the Children telah memprakarsai lahirnya ruang bagi 42 anak dari sembilan provinsi untuk menyampaikan pandangan mereka, termasuk hak untuk dilindungi, langsung ke Komisi PBB untuk Hak Anak (Mikiko Otani) dan pembuat kebijakan nasional. Anak-anak menuntut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar meningkatkan sistem perlindungan anak daring di Indonesia dan melibatkan anak-anak dalam pengembangan Laporan Negara tentang UNCRC periode V dan VI.
4. 299 penegak hukum dan pekerja sosial dilatih Manajemen Kasus, Hak Anak, Perlindungan Anak, dan Kesejahteraan Psikososial untuk memperkuat sistem peradilan ramah anak dan menerapkan diversifikasi dan keadilan restoratif. Kementerian Sosial mendanai pelatihan semacam itu yang dihadiri oleh pengawas dari 34 Provinsi. KemenPPPA melatih peserta dari 32 kota/kabupaten dari 19 provinsi yang dihadiri oleh 535 pekerja sosial. 489 pekerja sosial dan praktisi anak dilatih manajemen kasus secara daring. 843 anak yang selamat dari kekerasan telah menerima respons perlindungan yang tepat melalui model manajemen kasus Pusat Dukungan Anak dan Keluarga (PDAK).
5. Kami memfasilitasi pembentukan 133 Perlindungan Anak Berbasis Komunitas di wilayah kerja kami untuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, serta untuk mengakses penyedia layanan. 684 orangtua/pengasuh telah dijangkau melalui pelatihan pengasuhan anak, termasuk pelatihan kategori perak untuk 18 master trainer nasional.
6. Perlindungan anak telah diintegrasikan ke dalam prakarsa Mata Pencaharian Sensitif Anak (CSL - Child Sensitive Livelihoods) kami dan Keterampilan Remaja untuk Transisi yang Berhasil (ASST - Adolescent Skills for Successful Transition) yang mencegah 6.929 anak-anak yang rentan memasuki bentuk-bentuk pekerjaan yang berbahaya dan buruk. Kami juga berhasil membantu 57 anak keluar dari pekerjaan yang eksploitatif dan berbahaya.
7. Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat (CPiE - Child Protection in Emergency) telah dilaksanakan dalam respons kemanusiaan selama tahun 2019, dengan fokus pada pembangunan ketahanan dan mekanisme penanganan positif dalam menghadapi tekanan psikososial, menjangkau 44.892 anak dan pengasuh, dan menangani 224 kasus Unaccompanied and Separated Children (UASC). Save the Children terus mendukung penerapan Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan (CPMS - Child Protection Minimum Standards in Humanitarian Action) dalam program kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Pelatihan E-Course untuk CPiE telah dikembangkan dan 150 pekerja kemanusiaan telah mengikuti kursus ini secara daring, sementara 27 lembaga negara dan staf LSM menghadiri pelatihan tatap muka kami selama 2019.

Kemitraan

Save the Children bermitra dengan badan-badan pemerintah di tingkat nasional seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, KemenPPPA, Kemensos, Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, BNPB, dan di tingkat provinsi dan kabupaten seperti dengan Bappeda, DPPPA, Dinsos, Dikbud, Disdukcapil, dan BPBD. Kami juga menjalin kerja sama dengan Unicef, UNHCR, dan terlibat aktif dengan berbagai organisasi non-pemerintah di bawah aliansi EVAC di tingkat nasional (30 LSM) dan NTT (27 LSM), Indonesia Joining Forces to EVAC (6 LSM), dan Koalisi I8+ untuk menghapus pernikahan anak.



PENDIDIKAN

Kisah Angelita

Banyak anak di Indonesia belum bisa membaca nama mereka sendiri pada usia sembilan tahun. Bagi mereka yang berasal dari keluarga ekonomi lemah, tidak bisa membaca berpotensi meneruskan siklus kemiskinan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, Save the Children mengadakan program Reading Camp untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak. Salah satunya dilakukan di Sumba Barat.

Reading Camp menggunakan cerita, lagu, dan permainan, untuk meningkatkan kemampuan baca-tulis dan berhitung anak-anak usia 7-9 tahun. Salah satu anak yang ikut dalam Reading Camp adalah Angelita (9).

“Saya suka membaca buku. Saya ingin pintar dan mendapat pengetahuan baru. Jika kita ingin menjadi guru, jika kita ingin menjadi dokter, asal kita belajar, maka kita bisa melakukannya,” ungkap Angelita.

Setelah berpartisipasi dalam Reading Camp, kemampuan baca-tulis dan hitung Angelita meningkat. Maria (43), ibunya, sangat bangga dengan perkembangan Angelita.

“Saya hanya seorang lulusan sekolah dasar. Sekarang saya adalah ibu rumah tangga dan hanya berkebun. Saya berharap semua anak di daerah terpencil bisa mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan,” ungkap Maria.

99.093

Anak-anak dijangkau langsung

21.656

Orang dewasa dijangkau langsung

Tinjauan Dasar

Kesiapan bersekolah anak-anak di Indonesia terbilang masih rendah, terutama dalam hal literasi, matematika, dan pemecahan masalah kognitif. Anak-anak memiliki hambatan dalam hal keterampilan bahasa dan kognitif: 3,14 dari skala 10 pada usia 4 tahun dan 5,17 dari skala 10 pada usia 5 tahun (Bank Dunia, 2013).

Penelitian Save the Children di Indonesia Timur pada tahun 2018 juga menemukan jika kemampuan awal baca-tulis/berbahasa dan perkembangan kognitif/matematika awal adalah bidang yang paling kurang berkembang bagi anak-anak, dibandingkan dengan bidang lain seperti perkembangan emosi, motorik, dan sosial (Riskesdas, 2013).

Hasil belajar siswa di Indonesia juga terbilang masih rendah, terutama di bidang literasi, matematika, dan sains. Di tingkat sekolah dasar, hanya 23% siswa kelas 4 yang mencapai standar nasional minimum di bidang matematika dan hanya 53% di bidang membaca dengan provinsi Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur sebagai daerah dengan hasil belajar terendah (INAP - Indonesia National Assessment Program, 2016).

Selain itu, laporan tiga tahunan PISA (Programme for International Student Assessment) pada 2018 yang mengukur kemampuan kecakapan anak usia 15 tahun, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dalam membaca, ke-71 dalam matematika, dan ke-71 dalam sains dari 78 negara yang dinilai.

Walaupun capaian Indonesia dalam hal tingkat akses ke sekolah dasar sudah terbilang tinggi dalam 10 tahun terakhir, tantangan dalam hal tingkat akses ke pendidikan menengah masih ada. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 4,2 juta anak usia 7-18 tahun tidak bersekolah, yang mana hampir 4 juta di antaranya adalah remaja pada usia sekolah menengah (13-18 tahun) (Susenas 2018).

Sebagai tambahan, sebuah laporan yang diterbitkan pada Januari 2020 oleh Unicef menyatakan jika hampir 140.000 anak dengan disabilitas usia 7-18 tahun tidak bersekolah; hanya 56% anak dengan disabilitas menyelesaikan sekolah dasar; dan hanya 26% yang menyelesaikan sekolah menengah atas.

Selain itu, pembelajaran di situasi darurat juga menjadi tantangan tersendiri mengingat Indonesia berada di kawasan yang rawan akan bencana geologi dan hidrometeorologi. Ada sekitar 200.000 sekolah atau 75% dari total sekolah di Indonesia yang berlokasi di daerah rawan bencana (Bank Dunia, 2014). Namun, hanya 25.820 sekolah yang telah menjalankan program Sekolah Aman untuk mengantisipasi situasi darurat (BNPB, 2013). Sementara dalam 15 tahun terakhir, ada 46.648 sekolah yang terkena dampak bencana alam yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, berhentinya kegiatan belajar, dan masalah psikososial pada anak-anak (Kemendikbud, 2019).



2 DARI 3 anak usia 3-6 tahun di Indonesia tidak terdaftar di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

(Susenas, 2017)



72 DARI 77 Peringkat Indonesia berdasarkan hasil penilaian membaca.

(PISA, 2018)

8 DARI 10 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah.

(ICRW, 2017)



7 DARI 10 anak dengan disabilitas tidak memiliki akses ke sekolah.

(Susenas, 2018)



Tujuan Strategis Kami

Meningkatkan akses ke pendidikan usia dini dan pendidikan dasar yang berkualitas.

Sasaran Strategis Kami

1. Setiap anak usia 0-6 tahun memiliki akses ke Pendidikan Anak Usia Dini yang Holistik dan Integratif (PAUD-HI). Selain itu, setiap anak usia 6 tahun memiliki kesiapan untuk masuk ke sekolah dasar yang diukur melalui IDELA (International Development Early Learning Assessment).
2. Anak-anak yang rentan dan terpinggirkan, termasuk anak dengan disabilitas dan anak yang tinggal di daerah yang terkena bencana, mempunyai akses ke sekolah yang ramah anak, inklusif, serta aman.
3. Keterampilan membaca setiap anak dalam program literasi kami bisa meningkat pada akhir kelas 2 (diukur melalui penilaian keaksaraan).
4. Pengurangan Risiko Bencana yang Berpusat pada Anak (Child-Centered DRR), Keselamatan Sekolah Komprehensif (CSS - Comprehensive School Safety), serta piagam anak-anak bisa diimplementasikan di seluruh sekolah sasaran yang terletak di daerah rawan bencana.

Apa yang Kami Berikan dalam Program Pendidikan di Indonesia

Meningkatkan akses ke PAUD dan sekolah yang ramah anak dan inklusif



- Anak-anak usia 3-6 tahun memiliki akses ke PAUD yang dilengkapi dengan fasilitas bermain di dalam dan luar ruangan, serta fasilitas cuci tangan dan toilet.
- Anak-anak penyandang disabilitas memiliki akses ke PAUD dan pendidikan dasar.
- Memastikan anak-anak yang berada dalam situasi krisis dapat mengakses layanan pendidikan yang berkualitas.

Meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan, pemantauan, dan pendampingan guru



- Melatih guru PAUD tentang pedagogi, metodologi yang berpusat pada anak, serta literasi dan matematika dini.
- Melatih kepala sekolah, guru, pengawas, dan komisi sekolah tentang manajemen berbasis sekolah.
- Melatih master trainer, guru, dan pengawas sekolah tentang peningkatan literasi, Kurikulum Nasional 2013, pendidikan inklusif, pembelajaran aktif, disiplin positif, kesehatan, kebersihan, dan Pengurangan Risiko Bencana.

Melibatkan orangtua dan komunitas dalam pendidikan anak



- Melakukan pertemuan orangtua di PAUD dan sekolah guna membahas berbagai topik seperti perkembangan anak, disiplin positif, dan kesadaran membaca.
- Melatih fasilitator Reading Camp dan fasilitator orangtua.
- Melakukan kegiatan Reading Camp, kawan baca, festival membaca, dan penyediaan bank buku.

Advokasi dan kampanye dalam masalah pendidikan



- Mempromosikan PAUD yang holistik dan integratif melalui kampanye nasional dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan koalisi.
- Menggunakan pendekatan berbasis bukti untuk mempromosikan perubahan dalam kebijakan pemerintah nasional dan lokal tentang PAUD, literasi, Sekolah Aman, dan pendidikan inklusif.
- Advokasi peningkatan alokasi anggaran (dana desa, APBD, dan APBN) untuk mendukung pendidikan.

Pencapaian Utama Kami pada 2019

PAUD

- 10.134 anak usia 3-6 tahun (5.465 anak perempuan dan 4.919 anak laki-laki) telah mendapat manfaat dari pedagogi pengajaran yang meningkat dan rehabilitasi di 158 PAUD.
- 1.626 guru (1.379 perempuan dan 247 laki-laki) telah dilatih pedagogi pengajaran serta literasi dan matematika dini.
- Tujuh Kelompok Pengasuh Pria telah dibentuk dan 8.988 orangtua (7.431 perempuan dan 1.557 laki-laki) telah berpartisipasi dalam sesi pengasuhan untuk meningkatkan praktik pengasuhan.
- Metodologi pengajaran dengan permainan di PAUD dampingan telah meningkatkan kemampuan anak dalam hal baca tulis dasar (82%), matematika dasar (82%), dan perkembangan anak (25%).
- Advokasi pada pemerintah berhasil membuat pedoman kebijakan dan metode pelatihan PAUD yang holistik dan integratif diadopsi di lima kabupaten dan akan diintegrasikan dalam pedoman pelatihan guru PAUD nasional.

Pendidikan Dasar

- Save the Children mengujicobakan aplikasi digital (Waliku) untuk memantau ketidakhadiran siswa dan memungkinkan guru untuk menindaklanjuti dengan orangtua atau penyedia layanan masyarakat. Pemerintah daerah sekarang telah menginvestasikan sumber dayanya sendiri untuk meningkatkan aplikasi Waliku.
- Save the Children juga melakukan uji coba teknologi informasi dan komunikasi di sekolah-sekolah dasar di Jakarta. Hasilnya menunjukkan jika 60% guru telah mengalami peningkatan keterampilan dalam penggunaan teknologi untuk pengajaran di kelas, termasuk penilaian.
- 23.577 anak serta 3.125 guru dan staf di 130 sekolah di empat kabupaten telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal pengetahuan dan keterampilan terkait Pengurangan Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan Bencana.
- Program Pengurangan Risiko Bencana dan Sekolah Aman menyediakan platform keterlibatan yang lebih dekat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang pada gilirannya mengarah pada penetapan peraturan nasional tentang Sekolah Aman dan pedoman nasional tentang Pendidikan dalam Situasi Darurat.



Ulet Ifansasti/Save the Children

KEMISKINAN ANAK

Kisah Rua

Rua* (9) adalah siswa kelas empat sebuah sekolah dasar di Makassar. Setiap hari ia harus membantu orangtuanya bekerja sebagai pemulung. Teman-teman sekolahnya sering merundungnya karena hal tersebut. Akibatnya, ia sempat tidak mau ke sekolah selama berbulan-bulan.

“Teman-teman Rua yang bekerja sebagai pemulung selalu baik dengannya, tetapi yang lain sering merundungnya,” kata ibu Rua.

Save the Children menjalankan program untuk Rua dan anak-anak lainnya yang terpaksa bekerja di Tempat Pembuangan Akhir di Makassar. Melalui program tersebut kami berusaha meningkatkan kondisi kehidupan anak-anak dan keluarganya. Kami juga membangun Pusat Kegiatan Anak di mana anak-anak dapat bermain dan belajar seperti yang biasa dilakukan oleh anak-anak usia mereka.

* Bukan nama sebenarnya.

43.543

Anak-anak dijangkau langsung

64.908

Orang dewasa dijangkau langsung

Tinjauan Dasar

Sebanyak 25 juta orang Indonesia tergolong miskin dan hidup dengan penghasilan kurang dari Rp 425.250 (US\$30,29) per bulan (BPS, 2019). Mereka hidup jauh di bawah standar garis kemiskinan global, yakni US\$1,90 per hari. 14% anak-anak di Indonesia hidup di keluarga yang berada di bawah angka garis kemiskinan. Dari jumlah ini, 65% di antaranya mengalami kemiskinan multidimensi.

Perlindungan sosial adalah instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan, terutama melalui penyediaan bantuan tunai yang menawarkan dukungan reguler dan terprediksi kepada individu atau rumah tangga. Di Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 bertujuan memastikan jika pada tahun 2025, sistem perlindungan dan jaminan sosial dipersiapkan, diorganisir, dan dikembangkan guna memastikan dan memperkuat pemenuhan hak-hak masyarakat atas layanan sosial dasar.

Laporan TNP2K pada 2019 menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil menjangkau 25% anak-anak dari keseluruhan target pemerintah sebesar 40%. Hal ini berarti ada 15%

anak-anak yang tergolong miskin dan rentan belum tercakup oleh perlindungan sosial apapun. Angka ini setara dengan lima juta anak.

Kemiskinan memberi dampak signifikan pada anak. Pada anak usia dini, kemiskinan berpotensi membuat mereka tidak mendapat imunisasi ataupun layanan kesehatan yang berkualitas, serta menderita kekurangan gizi.

Pada anak usia sekolah, kemiskinan berpotensi membuat mereka tidak bisa sekolah dan harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Mereka biasanya terjebak dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya dan bergaji rendah. Selain itu, kemiskinan juga berpotensi meningkatkan angka perkawinan anak yang kerap terjadi karena latar belakang ekonomi.

Tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 6% yang meningkat menjadi 6,7% untuk perempuan pada tahun 2018. Selain itu, sekitar 23% remaja di Indonesia tidak terlibat dalam pendidikan, pelatihan, ataupun pekerjaan. Hal ini membuat mereka sulit bersaing untuk mendapat pekerjaan yang layak dan keluar dari lingkaran kemiskinan.



11 JUTA

anak-anak, atau setara dengan 14% dari total anak-anak di Indonesia, hidup dalam kemiskinan dan berisiko tereksklusi secara sosial.

(BPS, 2018)



65%

anak-anak mengalami kemiskinan multidimensi

(Unicef, 2018)

25%

anak-anak dijangkau melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

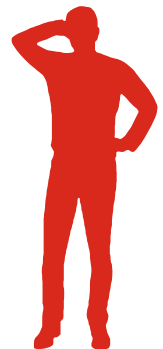
(TNP2K, 2019)



23%

remaja di Indonesia tidak terlibat dalam pendidikan, pelatihan, atau pekerjaan.

(ILO, 2019)



Tujuan Strategis Kami

1. Meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat serta keluarga untuk kesejahteraan anak-anak di daerah-daerah miskin ataupun bencana.
2. Meningkatkan keterampilan dan kecakapan remaja yang terpinggirkan dan miskin, termasuk mereka yang berusia 15-24 tahun yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan buruk dan berbahaya.

Sasaran Strategis Kami

Meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan bagi keluarga yang paling miskin dan rentan, baik dalam konteks pembangunan maupun respons kemanusiaan, agar mereka bisa meningkatkan kesejahteraan anak-anaknya melalui peningkatan akses ke skema perlindungan sosial, bantuan kemanusiaan, maupun peningkatan kapasitas serta pengembangan sosial dan masyarakat.

Program Intervensi dan Pencapaian pada 2019

1. Pada tahun 2019, Program Kemiskinan Anak dari Save the Children telah berhasil menjangkau 43.543 anak-anak dan 64.908 orang dewasa secara langsung. Ada empat komponen yang berkontribusi pada pencapaian tersebut, yaitu Perlindungan Sosial yang Sensitif Anak (CSSP - Child Sensitive Social Protection), Mata Pencaharian yang Sensitif Anak (CSL - Child Sensitive Livelihood), Keterampilan Remaja untuk Transisi yang Berhasil (ASST - Adolescent Skills for Successful Transition) serta Mata Pencaharian dan Ketahanan Pangan (FSL - Food Security and Livelihood) dalam situasi darurat.

perempuan dan pemuda juga telah berhasil meningkatkan dan memperkuat kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan di keluarga dan meningkatkan peran mereka di masyarakat. Partisipasi kaum muda dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan telah meningkatkan potensi mereka dan hal ini berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Perbaikan ini berdampak pada kemampuan orangtua untuk menyediakan pendidikan dan gizi pada anak-anaknya.
2. Program Perlindungan Sosial yang Sensitif Anak berhasil menjangkau 6.676 anak. Fokus utamanya adalah membangun kesadaran dan melibatkan masyarakat agar mau terlibat dalam memperkuat mekanisme pencegahan dan respons serta meningkatkan akses ke sistem perlindungan sosial pemerintah. Bekerja sama dengan Program Perlindungan Anak, program ini telah berhasil mengadvokasi 64 desa di tujuh kabupaten untuk mengalokasikan skema perlindungan sosial dari dana desa serta mempromosikan dan membangun sistem perlindungan anak berbasis masyarakat.
3. Program Mata Pencaharian yang Sensitif Anak dilakukan melalui Asosiasi Simpan Pinjam Desa (VSLA - Village Saving and Loan Association), diversifikasi mata pencaharian, dan kegiatan yang menghasilkan penghasilan tambahan, telah berhasil mengurangi kerentanan, meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan kebiasaan menabung dari 30.241 penerima manfaat, termasuk di antaranya 12.603 anak-anak. Program intervensi pemberdayaan
4. Program Keterampilan Remaja untuk Transisi yang Berhasil bertujuan membangun keterampilan remaja dan pemuda melalui peningkatan jejaring dan kepercayaan diri untuk melakukan transisi ke pekerjaan yang lebih layak. Berkolaborasi dengan sektor swasta dan 18 pusat pelatihan, program ini telah berhasil mendukung 19.129 remaja dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan. Jumlah ini terdiri dari 1.075 remaja yang mendapatkan pelatihan atau pendidikan, 15.590 remaja yang mendapatkan pekerjaan, dan 2.463 remaja yang memulai usahanya sendiri. Sebanyak 127 sekolah formal terlibat aktif dalam program ini.
5. Pada tahun 2019, Program Kemiskinan Anak dalam respons kemanusiaan telah berhasil menjangkau 487 remaja. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan serta mendukung inisiatif mereka untuk memulai usahanya sendiri.
6. Program Mata Pencaharian dan Ketahanan Pangan telah berhasil menyediakan kebutuhan sehari-hari pada 15.000 penyintas bencana di Palu dan Lombok.

Kemitraan

Save the Children bermitra dengan pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, Save the Children juga bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah seperti Yayasan Ibu, Yayasan Hotline, dan MGBK khususnya pada program remaja dan pemuda. Beberapa LSM lokal dan universitas juga terlibat dalam pengembangan program dan riset.

RESPONS KEMANUSIAAN

Kisah Salsa

Pada 28 September 2018, gempa berkekuatan 7,4 SR melanda Sulawesi Tengah dan memicu tsunami, tanah longsor, dan likuifaksi yang mengakibatkan kerusakan masif dan menewakan ribuan jiwa. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana itu menewaskan 4.340 jiwa, melukai 4.438 orang, dan mengakibatkan 164.626 orang mengungsi. Tercatat 42.864 rumah dan bangunan rusak atau hancur, termasuk 2.546 ruang kelas.

Salsa (10), siswa kelas lima sebuah sekolah dasar di Donggala adalah penyintas dari bencana tersebut. Gempa yang berpusat tidak jauh dari tempat tinggalnya ini membuat rumahnya hancur sehingga ia harus tinggal di tenda pengungsian.

Hari ini, Salsa sudah dapat kembali ke sekolah untuk belajar dan bermain dengan teman-temannya. Ia mendapat perlengkapan sekolah dari Save the Children dan juga menghabiskan waktu di Tempat Bermain Ramah Anak yang dikelola oleh Save the Children.

"Saya suka belajar. Mata pelajaran favorit saya adalah matematika karena menurut saya matematika itu mudah. Di masa depan, saya ingin sukses dan membuat orangtua saya bangga dan bahagia," ungkap Salsa dengan senyum lebar.

126.810

Anak-anak dijangkau langsung

101.159

Orang dewasa dijangkau langsung



Tinjauan Dasar

Indonesia berada di atas cincin api pasifik yang membuatnya rentan akan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, hingga erupsi gunung berapi. Selama 30 tahun terakhir, rata-rata terjadi 289 bencana alam tiap tahun, dengan korban meninggal rata-rata mencapai 8.000 orang tiap tahunnya.

Pemerintah Indonesia menghabiskan US\$300-\$500 juta per tahun untuk rekonstruksi pascabencana. Biaya yang diperlukan selama tahun-tahun terjadinya bencana besar itu mencapai 0,3% dari PDB nasional dan sebesar 45% dari PDB di tingkat provinsi.

Berdasarkan Penilaian Risiko Bencana, Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mencatat 12 potensi bencana alam yang menjadi prioritas yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, peristiwa pasang surut ekstrim, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, wabah penyakit atau pandemi, kegagalan teknologi, serta konflik sosial dan terorisme.

Pada tahun 2019, terjadi 3.814 bencana alam yang merusak 73.726 rumah, 1.123 fasilitas pendidikan, 213 fasilitas kesehatan, dan 688 fasilitas keagamaan. 478 orang meninggal dan 6,1 juta terpaksa harus mengungsi karenanya.

Selama 20 tahun terakhir, Indonesia juga telah mengalami kebakaran hutan yang signifikan. Kejadian paling parah terjadi pada tahun 2015,

di mana lebih dari dua juta hektar lahan terbakar. Kebakaran hutan juga memiliki dampak signifikan terhadap negara-negara tetangga.

Save the Children yang telah bekerja di Indonesia sejak 1976 memiliki staf dan sistem yang mampu segera turun dan bertindak untuk memberikan respons kemanusiaan setelah bencana terjadi. Dalam dua dekade terakhir, kami telah turun dalam berbagai respons kemanusiaan seperti tsunami Aceh, gempa Nias, gempa Yogyakarta, tsunami Pangandaran, banjir di Sumatera Utara dan Aceh Utara, gempa Sumatera Barat, gempa Jawa Barat, erupsi Gunung Merapi, banjir di Malaka, gempa Bener Meriah, Krisis Laut Andaman, El-Nino di NTT, banjir dan gempa bumi Jawa Barat, erupsi Gunung Agung, dan baru-baru ini gempa Lombok, gempa dan tsunami Sulawesi Tengah, serta tsunami Selat Sunda.

Indeks risiko INFORM (2019) mengidentifikasi Indonesia sebagai negara yang memiliki risiko krisis dan bencana dengan kategori sedang dan stabil. Meski begitu, krisis dan bencana yang terjadi dapat mengurangi kapasitas atau kemampuan tanggap nasional. Indeks ini terdiri dari tiga dimensi, yaitu bahaya dan paparannya, kerentanan, dan kurangnya kapasitas dalam mengatasi. Indeks ini menunjukkan jika Indonesia telah memiliki kapasitas yang memadai untuk menghadapi krisis dan bencana, namun tetap masih membutuhkan bantuan karena ketika krisis atau bencana melanda, biasanya akan terjadi kelumpuhan sementara yang membuat sistem yang telah dirancang tidak bisa berjalan dengan optimal.



60-70%

korban bencana alam di Indonesia adalah anak-anak, perempuan, dan orang tua.

(BNPB, 2019)



148 JUTA

penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan bencana.

(BNPB, 2018)

6.1 JUTA

orang harus mengungsi karena bencana alam yang terjadi sepanjang 2019 di Indonesia.

(BNPB, 2020)



3.814

bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang 2019.

(BNPB, 2020)



Tujuan Strategis Kami

Tujuan kami adalah membantu anak-anak guna memastikan mereka dapat bertahan hidup, belajar, dan terlindungi dalam setiap bencana atau krisis kemanusiaan.

Tinjauan Strategis

Kami selalu mementingkan kualitas dan jangkauan dalam setiap pelaksanaan respons kemanusiaan. Melalui kolaborasi dan advokasi pada isu-isu strategis, kami akan terus meningkatkan kualitas respons kemanusiaan di Indonesia. Kami akan berusaha membangun dan menginvestasikan sumber daya, keuangan, dan lainnya, untuk memenuhi ambisi dan tujuan kami, serta akan bertanggung jawab mendorong kemajuan sehubungan dengan tujuan spesifik dan memantau perkembangan selama lima tahun ke depan.

Program Intervensi dan Pencapaian pada 2019

Pada tahun 2019, kami melanjutkan respons kemanusiaan kami di Lombok dan Sulawesi Tengah untuk mendukung anak-anak dan keluarganya untuk pulih dan bangkit pascabencana.



Gempa Lombok

Setelah gempa awal berkekuatan 6,4 SR terjadi pada 29 Juli, Lombok kembali dihantam gempa susulan yang lebih besar berkekuatan 6,9 SR pada 5 Agustus 2018. Gempa terakhir ini memakan lebih banyak korban jiwa dibanding gempa pertama yang terjadi di bulan Juli. Respons kemanusiaan kami berfokus pada penyediaan tempat tinggal darurat dan layanan kesehatan, penyediaan ruang belajar dan bermain yang aman bagi anak-anak, memberikan bantuan psikologis awal dan memperkuat mekanisme perlindungan anak, serta mendukung pemulihan sistem layanan kesehatan. Total penerima manfaat program respons kemanusiaan kami pada akhir tahun 2019 adalah 20.149 orang, di mana 11.801 di antaranya adalah anak-anak.



Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah

Pada tanggal 28 September, gempa bumi berkekuatan 7,4 SR menghantam Sulawesi Tengah dan menyebabkan kerusakan parah di berbagai lokasi. Gempa bumi ini lalu diikuti dengan tsunami yang menerjang pantai Talise di Kota Palu dan pantai-pantai di Donggala. Total terdapat 1.536.367 orang yang terkena dampak dari peristiwa ini. Mereka tersebar di enam kabupaten dan 85 kecamatan. Bencana ini mengakibatkan 4.340 orang meninggal, 164.626 orang mengungsi, 42.864 rumah rusak, 4.438 orang luka parah, 667 orang hilang, dan 2.546 ruang kelas rusak atau hancur.

Respons kemanusiaan kami meliputi penyediaan fasilitas seperti air bersih dan sanitasi untuk para penyintas, tempat tinggal sementara, bantuan tunai pada penyintas yang rentan secara ekonomi untuk membeli kebutuhan pokok, memberikan dukungan pada petugas kesehatan dan sukarelawan untuk meningkatkan gizi ibu dan bayi, pembangunan sekolah dan ruang belajar, penelusuran keluarga untuk mengembalikan anak-anak yang terpisah karena bencana, serta penyediaan Ruang Ramah Anak sebagai tempat aman bagi anak untuk belajar dan bermain bersama teman-temannya. Selama dua tahun, kami akan fokus mendukung para penyintas untuk bisa pulih dan bangkit. Total penerima manfaat program respons kemanusiaan ini pada akhir 2019 mencapai 214.324 orang, di mana 102.165 di antaranya adalah anak-anak.

Melalui Respons Sulawesi Tengah, kami mendorong konsep pelokalan, di mana aktor-aktor di tingkat lokal yang kami dorong untuk mengambil peran strategis dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya yang tersedia untuk tahap respons dan pemulihan. Aktor-aktor ini berada di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Sedangkan aktor-aktor di tingkat nasional akan memberikan dukungan jika diperlukan. Pelokalan di Indonesia dilakukan dengan memperkuat sumber daya di tingkat yang paling lokal, yaitu komunitas itu sendiri. Kami percaya kekuatan desentralisasi seperti ini akan semakin memperkuat kemampuan lokal dalam menghadapi bencana atau krisis kemanusiaan, tanpa selalu tergantung pada pemerintah nasional.



Thomas Gustafian/Save the Children

TATA KELOLA HAK ANAK

Kisah Zahra

Perkawinan anak biasanya terjadi karena alasan ekonomi. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, anak perempuan yang berasal dari rumah tangga miskin memiliki risiko dua kali lebih tinggi untuk terperangkap dalam perkawinan anak.

Pada usia delapan tahun, Zahra (sekarang 13 tahun) melihat sepupunya yang masih berusia 14 tahun dipaksa menikah. Pernikahan ini mengejutkan Zahra karena ia melihat masa kecil sepupunya hilang. Ia tidak ingin pengalaman sepupunya ini terjadi pada anak-anak lainnya.

“Saya melihat dengan mata kepala sendiri, masa kecil sepupu saya yang seharusnya diisi dengan belajar dan bermain justru digantikan dengan mengurus suami, anak-anak, dan keuangan keluarga. Ia tidak bisa bermain dengan bebas seperti teman-temannya dan hal ini membuatnya depresi,” ungkap Zahra.

Zahra adalah dampingan kami di program Coaching for Life. Program ini bertujuan untuk memperkuat hak-hak anak melalui sepak bola. Maret lalu, Zahra dijadwalkan berbicara di depan Komisi PBB tentang Status Wanita di New York. Pada acara itu, Zahra diberi ruang untuk menyampaikan pandangannya terkait perkawinan anak.

Namun, pandemi COVID-19 membuat acara ini ditunda. Meski kecewa, Zahra tetap berkomitmen untuk terus menolak perkawinan anak. Baginya, tidak boleh ada anak yang harus jadi pengantin.

1.697

Anak-anak dijangkau langsung

809

Orang dewasa dijangkau langsung

Tinjauan Dasar

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (UNCRC) adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dan berlaku untuk setiap anak. Konvensi ini diadopsi oleh PBB pada November 1989 dan setiap negara telah meratifikasinya, kecuali Amerika Serikat. Hal ini menjadikannya perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi. Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 1990.

Sejak ikut meratifikasi pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia telah menyerahkan laporan berkala kepada Komite Hak Anak (CRC). Komite ini menerima laporan pertama pada tahun 1993 (yang mencakup periode 1990-1992), diikuti oleh laporan kedua pada tahun 2002 yang ditinjau pada tahun 2004, dan laporan berkala ketiga dan keempat yang diselesaikan pada tahun 2010.

Pemantauan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan hak-hak anak merupakan langkah penting untuk menciptakan akuntabilitas atas pelaksanaan UNCRC. Setiap negara menulis laporan secara berkala dan mengirimkannya ke Komite Hak Anak yang mempelajarinya secara bersamaan dengan informasi dari pihak lain, mengajukan pertanyaan, lalu memberikan kesimpulan dan rekomendasi kepada pemerintah negara tersebut, kemudian pemerintah yang berkaitan kembali ke negara masing-masing untuk memperbaiki situasi dan memberikan laporan lagi beberapa tahun kemudian, dan seterusnya.

Berdasarkan pengamatan akhir Komite Hak Anak pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mendorong pengajuan laporan berkala kelima dan keenam yang jatuh tempo pada tanggal 7 Oktober 2019.

Pemerintah Indonesia telah mulai menyusun laporan tetapi belum menyerahkannya kepada Komite Hak Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah menulis draf laporan tersebut. Laporan resmi negara harus mencakup evaluasi komprehensif tentang bagaimana UNCRC diterapkan melalui undang-undang, kebijakan, dan tindakan nasional.

Save the Children di Indonesia bersama dengan koalisi LSM telah secara aktif mengadvokasi pemerintah terkait pengajuan laporan dan juga menginisiasi laporan alternatif dengan mempertimbangkan "pedoman pelaporan", "pengamatan akhir", dan versi terbaru dari draf laporan berkala negara kelima dan keenam.

Laporan alternatif bisa menunjukkan keprihatinan dan rekomendasi masyarakat sipil serta anak-anak di Indonesia tentang situasi nyata yang mereka alami, serta bisa menggambarkan upaya pemerintah dan pemangku kebijakan dalam memenuhi hak-hak anak tersebut. Selain itu, untuk memenuhi hak-hak anak, pemerintah Indonesia juga harus lebih banyak berinvestasi dalam kesehatan, pembelajaran, dan perlindungan anak, terutama pada kelompok anak-anak yang paling rentan dan miskin.

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan penggunaan anggaran dan juga keterbukaan tentang siapa yang diuntungkan dengan penggunaan anggaran tersebut. Save the Children telah terlibat secara aktif dalam pemantauan dana desa di tingkat desa untuk memastikan alokasi uang untuk meningkatkan kehidupan anak-anak.



13.5 JUTA

anak, setara dengan 17% dari total anak di Indonesia, tidak memiliki akta kelahiran.

(Profil Anak Indonesia, 2019)



492.5 TRILIUN

total anggaran untuk pendidikan atau 20% dari total APBN.

(Kementerian Keuangan, 2019)



123.1 TRILIUN

total anggaran untuk kesehatan atau 5% dari total APBN.

(Kementerian Keuangan, 2019)

70 TRILIUN

total anggaran Dana Desa untuk pembangunan desa.

(Kementerian Keuangan, 2019)



Tujuan Strategis Kami

Investasi publik untuk anak-anak direncanakan dan diimplementasikan dengan baik, sehingga anak-anak yang terpinggirkan, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai akses yang lebih baik ke bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan.

Sasaran Strategis Kami

1. Terlibat dengan Komisi PBB bidang Hak-Hak Anak dengan menggunakan Pendekatan Umum tentang Pelaporan Hak Anak.
2. Memperkuat partisipasi bermakna anak-anak dan remaja dalam penelitian dan advokasi aksi hak-hak anak dengan memperkuat peluang formal mereka dalam mempengaruhi anggaran dan proses tata kelola lainnya.
3. Memastikan penyebaran pemahaman anggaran dan kesadaran yang lebih luas tentang bidang-bidang terobosan utama di antara masyarakat sipil dan pemangku kepentingan utama lainnya.

Program Intervensi dan Pencapaian pada 2019

I. Memantau dan Mendorong Pemenuhan Hak Anak

Save the Children berkolaborasi dengan anak-anak dan komunitas untuk memahami situasi anak dan membantu mereka menyuarakan aspirasinya terkait pemenuhan hak anak. Kami berusaha memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak mampu secara terbuka menjelaskan apa yang telah mereka lakukan atau gagal mereka lakukan, serta tindakan-tindakan apa yang akan mereka ambil untuk meningkatkan kehidupan anak-anak.

Save the Children dengan koalisi LSM (terdiri lebih dari 40 LSM) juga melakukan konsultasi anak di sembilan provinsi dalam rangka mengumpulkan informasi dari anak-anak mengenai pemenuhan hak-hak mereka dengan merujuk pada observasi akhir pada tahun 2014. Setelah konsultasi dengan anak di tingkat provinsi dan kabupaten, Save the Children bersama dengan koalisi LSM menginisiasi dialog antara anak-anak dengan anggota Komisi Hak Anak PBB, Mikiko Otani pada November 2019 di Jakarta. Ada 42 perwakilan anak dari setiap bidang konsultasi. Mereka menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota komisi.

Pada tahun 2019, ada 57 pemuda usia 15-27 tahun, yang terdiri dari 27 perempuan dan 30 laki-laki dari Yogyakarta dan Soppeng, yang dilibatkan menjadi peserta aktif konsultasi tentang Indonesia Voluntary Review di Sustainable Development Goals (SDG). Beberapa rekomendasi utama terkait investasi publik dalam bidang pendidikan yang mereka utarakan antara lain:

1. Alokasi anggaran pendidikan nasional dan daerah perlu ditinjau dengan mempertimbangkan wilayah geografis dan efektivitas penyerapan anggaran.
2. Ketersediaan beasiswa harus menjangkau kaum muda yang terpinggirkan.

Rekomendasi ini telah disampaikan kepada Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Tata Kelola Pemerintah yang Baik yang Menjamin Hak Anak

Untuk mewujudkan hak-hak anak, pemerintah harus menerapkan sistem hak-hak anak yang mencakup undang-undang, kebijakan, mekanisme koordinasi, sistem pengumpulan data, dan mekanisme akuntabilitas. Sistem ini terdiri dari sejumlah Ukuran Umum Implementasi (General Measures of Implementation).

Di Indonesia, Save the Children terus terlibat dalam proses pelaporan UNCRC dan Universal Periodic Review yang bekerja sama dengan organisasi lain yang berfokus pada anak. Pada tahun 2019, Save the Children bersama dengan Koalisi LSM Nasional untuk Pemantauan Hak Anak telah mengembangkan instrumen untuk membuat laporan alternatif dari laporan berkala Indonesia ke-5 dan ke-6.

3. Investasi Publik pada Anak

Untuk memenuhi hak-hak anak, pemerintah harus berinvestasi lebih banyak dalam kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak, terutama untuk kelompok anak-anak yang rentan dan miskin. Pemerintah perlu meningkatkan bagaimana anggaran negara dibelanjakan dan lebih terbuka tentang siapa yang diuntungkan.

Di Indonesia, Save the Children secara terus menerus terlibat di tingkat kabupaten hingga desa untuk memastikan anak-anak diprioritaskan dalam alokasi dan belanja anggaran negara. Di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Save the Children telah berhasil mendorong para pejabat desa agar mengembangkan alokasi anggaran untuk pendidikan anak usia dini. Hasilnya pada tahun 2019, desa-desa di Sumba Barat telah meningkatkan alokasi anggaran desa untuk PAUD yang semula 1% dari total anggaran menjadi 3% dari total anggaran.

Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Save the Children telah berhasil mendorong peningkatan alokasi anggaran dana desa di 15 desa untuk anak-anak. Kini, mereka mengalokasikan Rp 250.000-400.000 per bulan per orang untuk guru dan manajer PAUD. Sedangkan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, program intervensi telah menyebabkan satu desa mengalokasikan anggaran untuk enam fasilitator Reading Camp senilai Rp 150.000 per bulan per orang. Pemerintah di tingkat kabupaten telah berkomitmen untuk melanjutkan dan menambah anggaran untuk mendukung keberlanjutan PAUD dan Reading Camp ini.

Kemitraan

Semua program Tata Kelola Hak Anak membutuhkan kolaborasi yang erat dengan anak-anak, masyarakat, pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta sektor swasta untuk saling memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Kami akan terus mengambil bagian dalam serangkaian kemitraan, termasuk Forum Anak di tingkat provinsi dan kabupaten, Kelompok Pemuda untuk SDG, Koalisi LSM Nasional untuk Pemantauan Hak Anak, koalisi LSM untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Anak, koalisi LSM Agenda Pasca-2015, Indonesia Global Compact Network, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Anak, dan semua kementerian serta lembaga-lembaga PBB terkait.



Pneumonia adalah pembunuh balita tertinggi kedua di dunia. Di Indonesia, Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu daerah dengan tingkat pneumonia anak tertinggi (Risksdas 2018). Bekerja sama dengan kader Posyandu dan pemerintah, Save the Children melakukan kampanye untuk meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku orang tua terkait pneumonia. Kami juga mengadvokasi masalah ini ke pemerintah sehingga anak-anak dapat dijauhkan dari penyakit ini. (Ulet Ifansasti/Save the Children)

AKTIVITAS KAMPANYE DAN ADVOKASI KAMI

Kami mengadvokasi dan mengkampanyekan perubahan untuk mewujudkan hak-hak anak dan untuk memastikan bahwa suara mereka didengar. Advokasi kami meliputi penelitian dan analisis kebijakan, lobi, komunikasi, dan kampanye publik. Dalam situasi yang berbeda, advokasi kami juga berfokus pada pengamanan perubahan kebijakan formal, mendorong implementasi kebijakan yang ada, atau menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk perubahan.

Dengan advokasi dan program kampanye yang direncanakan dengan cermat, yang didasarkan pada bukti program yang dijalankan, kami membuat argumen yang kuat untuk kebijakan yang pro-anak dan pro-perubahan sosial. Kami mengadvokasi dan membuat kampanye untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah, lembaga, sektor swasta, dan masyarakat luas, untuk mencapai perubahan positif dalam kehidupan anak-anak.



Kampanye Kami pada 2019

Pada bulan Agustus 2019, Save the Children meluncurkan Kampanye Stop Pneumonia selama tiga tahun sebagai tindak lanjut dari Analisis Situasi terkait Pneumonia pada Anak dan Strategi Komunikasi 2018. Pneumonia adalah pembunuh nomor satu pada balita di dunia dan pembunuh nomor dua pada balita di Indonesia.

Fokus tahun pertama kami tahun 2019 adalah meningkatkan kesadaran. Kami mengembangkan situs “www.stoppneumonia.id” dan kegiatan yang tak terhitung jumlahnya mulai dari penempatan media, acara luar ruangan dan siaran langsung digital, kompetisi

blogger dan vlogger, acara bersama dengan Kementerian Kesehatan, jambore dengan pemandu kesehatan, kampanye pengasuhan anak, lari virtual, dan seminar.

Kami juga melakukan talk show radio yang disiarkan oleh 100 stasiun radio di 22 provinsi dengan 22 juta pendengar. Kami memanfaatkan hari-hari nasional yang penting, 1.600 peserta dilibatkan untuk mempromosikan peran ayah dan partisipasi anak-anak dalam kampanye mencuci tangan dengan para pejabat pemimpin kabupaten.



Advokasi Kami pada 2019



Tingkat Nasional

- Save the Children memainkan peran kunci dalam advokasi terkait pentingnya alokasi anggaran Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan pentingnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) MTBS untuk semua Puskesmas.
- Pemerintah memberlakukan undang-undang Pekerja Sosial Nomor 14/2019. Kami terlibat dalam proses advokasi bersama dengan Konsorsium Pekerja Sosial Indonesia (KPSI) seperti audiensi publik dengan parlemen, seminar nasional, dan pertemuan tingkat tinggi dengan Kementerian Sosial.
- Kementerian Kesehatan juga telah membuat komitmen untuk meningkatkan anggaran program Pneumonia pada tahun 2021.
- Praktik yang mempengaruhi manajemen kasus untuk menangani kekerasan terhadap anak-anak juga berlanjut pada 2019. Total 523 staf Perlindungan Anak di 32 provinsi dari 46 organisasi seperti Kemensos dan LSM telah dilatih secara langsung dan 484 staf melalui platform e-training.



Tingkat Kabupaten

- Program yang mempengaruhi perubahan kebijakan tercermin pada Program Pneumonia dengan dikeluarkannya SK No. P/34106/440/XII/Dinkes/2019 pada 27 Desember 2019 tentang Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Keputusan ini mengamankan alokasi anggaran untuk manajemen penyakit anak termasuk pneumonia.
- Program yang mempengaruhi sumber daya keuangan pemerintah di Sumba Barat melalui program kami di mana 13 desa mengalokasikan hingga Rp 7.000.000 per tahun per desa untuk program peningkatan kesadaran dalam mencegah pneumonia pada anak.
- Program yang mempengaruhi praktik pemerintah di NTT dan NTB melalui pembentukan gugus tugas untuk mengembangkan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini yang Holistik dan Integratif (PAUD-HI) di kabupaten untuk diimplementasikan dalam rencana aksi nasional di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara (NTT) dan Kabupaten Lombok Utara di NTB.



Tingkat Provinsi

- Dalam konteks pengasuhan, 190 staf Perlindungan Anak dari 30 organisasi telah dilatih, sebagian besar di Sulawesi Selatan dan Malang.
- Dalam konteks respons kemanusiaan terkait gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018, melalui kerja advokasi kami, Gubernur Sulawesi Tengah membentuk satuan tugas untuk provinsi ramah anak, di mana salah satu indikatornya adalah pengurangan angka perkawinan anak.
- Kami juga mengadvokasi Gubernur Sulawesi Tengah tentang penerapan standar sekolah yang aman sesuai dengan Pengurangan Risiko Bencana di tingkat provinsi. Hal ini saat ini masih menunggu persetujuan Gubernur.



Anggun C. Sasmi tampil di konser spesial kolaborasi antara P&G dengan Save the Children berjudul "Satukan Nada Wujudkan Mimpi Anak Indonesia" pada tahun 2019. Semua pendapatan dari tiket disumbangkan untuk anak-anak dan keluarga penyintas gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. (Thomas Gustafian/Save the Children)

KEGIATAN PENGALANGAN DANA KAMI

Ada dua sorotan utama di tahun 2019, yaitu Tumbuh dan Berdampak. Tahun 2019 merupakan tahun luar biasa bagi kami karena berbagai program yang kami lakukan telah berhasil memberikan dampak pada ribuan anak di Indonesia. Para donatur yang mendukung kami melalui donasi satu kali maupun rutin telah membantu kami dalam membuat perubahan nyata bagi kesejahteraan anak-anak.

Melalui berbagai metode penggalangan dana, kami menyuarakan tantangan yang dihadapi anak-anak serta meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya melindungi hak-hak anak. Kami senang bahwa kami tidak berdiri sendiri untuk memperjuangkan hak-hak anak.

Berkat dukungan 27.711 donatur perorangan di delapan kota dan lebih dari 70 perusahaan, kami berhasil mengumpulkan lebih dari Rp 31 miliar. Donasi ini memungkinkan berbagai program dan pekerjaan di lapangan berlangsung, salah satunya di Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa di Makassar, di mana kami membantu anak-anak yang bekerja sebagai pemulung untuk bisa mengakses pendidikan dan mempersiapkan mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Untuk mempertahankan donatur setia, tim retensi membawa donatur terpilih untuk berkunjung ke lokasi program kami dan melihat secara langsung bagaimana donasi mereka digunakan. Tim ini secara teratur juga mengirimkan update kepada para donatur sebagai pertanggungjawaban atas donasi yang telah diberikan.

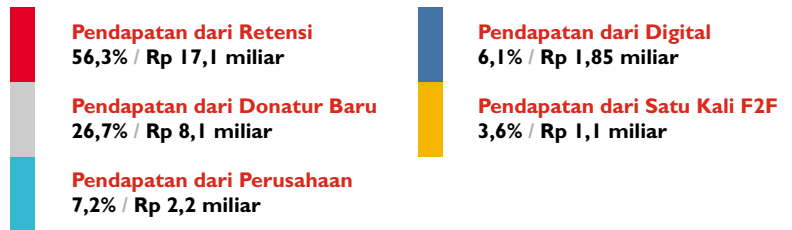
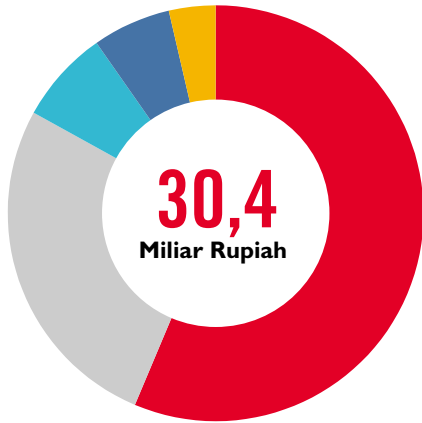
Kami juga melihat komitmen yang tumbuh dari perusahaan yang berinvestasi dalam berbagai model kemitraan untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat yang lebih baik bagi anak-anak. Pada tahun 2019 kami dan P&G berkolaborasi untuk mengadakan konser berjudul "Satukan Nada Wujudkan Mimpi Anak Indonesia." Konser ini berhasil mengumpulkan dana hingga Rp 3,06 miliar yang lalu disalurkan pada anak-anak dan keluarganya yang menjadi penyintas gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Dalam dunia digital, kami bermitra dengan KitaBisa.com dan berhasil mengumpulkan Rp 1,5 miliar sepanjang tahun 2019. Tim digital internal kami mengalami pertumbuhan yang kuat pada 2019 dan mampu mengumpulkan donasi senilai Rp 1,8 miliar dan membantu meningkatkan kekuatan brand Save the Children.

Hasil Penggalangan Dana Kami

Tahun 2019 adalah tahun keempat kegiatan penggalangan dana kami di Indonesia. Setelah proses persiapan dan beberapa tes pada tahun 2015, hasil kegiatan penggalangan dana, dalam hal donatur individu aktif dan pendapatan yang diterima, meningkat setiap tahun.

Hasil ini dicapai dengan memfokuskan kegiatan penggalangan dana untuk meningkatkan pemasukan tidak terbatas (unrestricted income).



Mitra Perusahaan Kami

Selama tiga tahun terakhir kami telah berkolaborasi dengan berbagai mitra perusahaan, baik secara global maupun lokal, untuk mendukung tujuan kami dalam mendukung anak-anak di Indonesia.

Bersama-sama, kami berusaha menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam kehidupan anak-anak di Indonesia dan mendorong perubahan yang diperlukan.





Siswa kelas lima Azahra, (11, tengah) berbagi cerita dengan staf Save the Children (kanan) dan teman-temannya di sekolah yang didukung oleh Save the Children di Donggala, Sulawesi Tengah. Azahra adalah salah satu anak penyintas gempa berkekuatan 7,4 SR yang melanda Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 yang menyebabkan kerusakan masif dan hilangnya ribuan nyawa. (Jiro Ose/Save the Children)

TENTANG ORGANISASI KAMI



Pindai QR code untuk menonton video Kebijakan Perlindungan Anak kami

Organisasi kami memiliki lebih dari 500 staf dan tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan pada anak. Kami sangat menekankan pentingnya membangun kesadaran akan hal tersebut dan memastikan implementasinya di lapangan.

Jumlah staf pada tahun 2019 turun 5,7% dibanding tahun 2018. Hal ini disebabkan karena respons kemanusiaan yang kami lakukan di Sulawesi Tengah akan selesai. Namun, staf penempatan internal kami meningkat sebesar 4% dibanding tahun 2018.

Di tahun 2019, kami berhasil meningkatkan keseimbangan gender sebesar 5%. Kini, proporsi gender staf kami relatif seimbang, dengan rasio 51% laki-laki dan 49% perempuan.

Untuk mendukung dan melengkapi peraturan perusahaan, kami telah mengimplementasikan pedoman sumber daya manusia yang baru, yang bertujuan untuk mengakomodasi pertumbuhan organisasi. Terjadi peningkatan operasi sumber daya manusia yang signifikan setelah penerapan pedoman baru tersebut.

Untuk memperkuat kapasitas kami dalam melakukan respons kemanusiaan, kami mengadakan serangkaian penguatan kapasitas

seperti Pelatihan Prinsip-Prinsip Dasar Kemanusiaan untuk mempersiapkan para staf untuk turun dalam respons kemanusiaan. Selain itu, kami juga telah memiliki tim khusus yang siap diturunkan kapanpun saat terjadi krisis kemanusiaan, baik di lingkup nasional maupun internasional.

Dalam hal Pembelajaran dan Pengembangan, kami telah membuat dan menggunakan situs yang didedikasikan khusus oleh staf untuk belajar dan mengembangkan diri. Situs ini menjadi platform untuk berbagi informasi dan konten pelatihan. Kami juga telah berhasil melaksanakan program pendampingan dan pelatihan untuk para manajer, serta menyelesaikan serangkaian pelatihan pengembangan kapasitas untuk staf.

Kami mengukur kepuasan staf dalam organisasi kami secara berkala melalui survei tahunan. Kami berusaha terus meningkatkan keterlibatan staf kami, baik melalui berbagai kegiatan seperti perayaan hari kemerdekaan, pembangunan tim, maupun kegiatan olahraga. Kegiatan-kegiatan ini merupakan salah satu cara kami untuk memperkuat budaya dan nilai-nilai organisasi kami.

PROFIL KEUANGAN KAMI

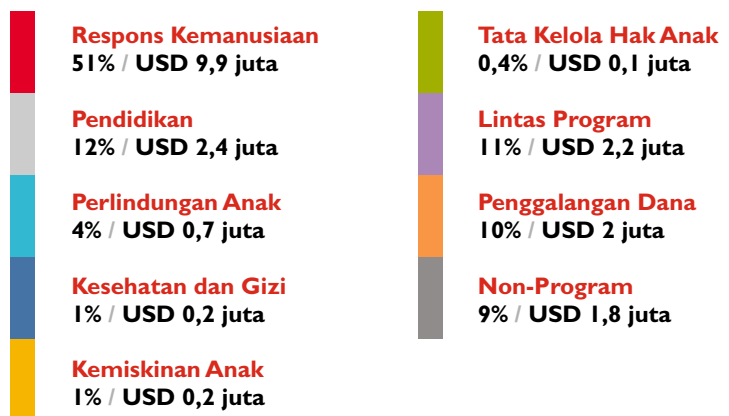
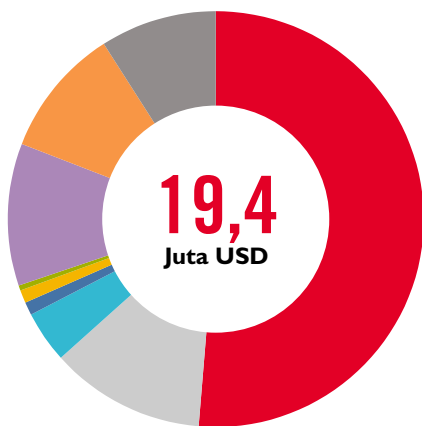
Pemasukan kami terdiri dari Pemasukan Terbatas (Restricted Income) yang harus digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan oleh donatur, dan juga Pemasukan Tidak Terbatas (Unrestricted Income) yang dapat digunakan untuk mendanai program yang akan memiliki dampak besar.

Pemasukan Tidak Terbatas berperan penting saat terjadi krisis kemanusiaan karena pemasukan ini membantu kami untuk mampu bertindak cepat dan memenuhi kebutuhan anak-anak di lokasi bencana yang bisa berubah sewaktu-waktu. Selain itu, pemasukan ini

juga penting artinya bagi organisasi karena bisa mendukung kami untuk mencapai tujuan strategis, mendukung pertumbuhan jangka panjang organisasi, dan membawa perubahan yang berarti dan bertahan lama bagi anak-anak.

Portofolio kami pada tahun 2019 lebih besar 25% dibanding tahun 2018. Portofolio ini sebagian besar berasal dari respons kemanusiaan di Sulawesi Tengah yang sudah kami lakukan sejak September 2018.

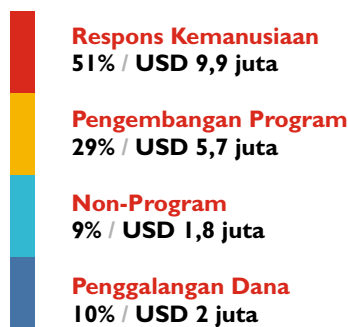
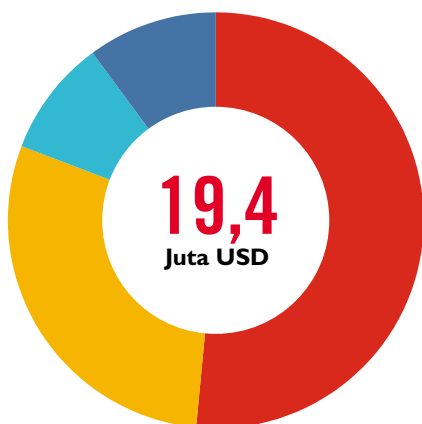
Pengeluaran Kami Berdasarkan Portofolio Tematik pada 2019



Total Pengeluaran Kami pada 2019

Pengeluaran program mencakup semua sumber daya penting yang diperlukan untuk merancang, memberikan, dan mengelola program kami di area tempat kami bekerja. Pengeluaran ini termasuk logistik, kepegawaian, pelatihan, layanan pendukung, dan pelaksanaan kegiatan program kami, baik yang dilakukan oleh staf lapangan kami sendiri atau melalui mitra kami.

Pengeluaran non-program adalah biaya administrasi dan tata kelola untuk mendukung infrastruktur organisasi kami, seperti hukum, keuangan, SDM, manajemen risiko, kepemimpinan, pengawasan program, dan kampanye. Penggalangan dana berhubungan dengan investasi yang kami lakukan guna mengumpulkan dana lanjutan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan kami.



Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Yayasan Sayangi Tunas Cilik telah terdaftar sebagai yayasan lokal berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-01712.50.10.2014 pada 21 Mei 2014.

Dewan Pembina

Ketua

Ahmad Yuniarto

Wakil Ketua

Dewi Soeharto

Anggota

Herry Budiazhari
Evita Legowo
Sancoyo Antarikso
Neneng Goenadi
Paul Ronalds
Nora Ingdal
Giancarla Pancione

Dewan Pelaksana

Ketua

Selina Patta Sumbung

Wakil Ketua I

Michel Rooijackers

Wakil Ketua II

Erwin Simangunsong

Sekretaris I

Kurwiany Ukar

Sekretaris II

Fajar Jasmin Sugandhi

Bendahara I

Pritawati

Bendahara II

Maitra Yodha Rahma Widiyantini

Tim Manajemen Senior

Direktur Utama

Selina Patta Sumbung

Direktur Operasional

Michel Rooijackers

Direktur Advokasi dan Kampanye

Tata Sudrajat

Direktur Komunikasi

Fajar Jasmin Sugandhi

Direktur Keuangan

Pritawati

Direktur Penggalangan Dana dan Pemasaran

Maitra Yodha Rahma Widiyantini

Direktur Humanitarian

Dino Satria

Direktur Sumber Daya Manusia

Kurwiany Ukar

Direktur Operasional Program

Erwin Simangunsong

Direktur Pengembangan Program dan Kualitas

Claire Henery

Manajer Awards

Bravey Wurangian

“Tujuan dari Save the Children kerap dianggap mustahil tercapai, karena sampai kapanpun akan selalu ada anak yang menderita. Kami sadar, tujuan ini tampak mustahil jika kita terus menganggapnya mustahil. **Kemustahilan itu hanya terjadi jika kita menolak untuk mencobanya.**”

Eglantyne Jebb, pendiri **Save the Children**



Save the Children di Indonesia telah terdaftar sebagai yayasan lokal bernama **Yayasan Sayangi Tunas Cilik** berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-01712.50.10.2014 pada 21 Mei 2014.

Alamat : Jl. Bangka IX No.40 A & B, Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12720

Telepon : +62 (21) 782 4415

Instagram : savechildren_id

Twitter : SaveChildren_ID

Facebook : Save the Children Indonesia

Youtube : Save the Children Indonesia

www.stc.or.id